



# Buruh Tolak Upah Rp 1,5 Juta

**YOGYAKARTA** - Puluhan buruh Yogyakarta, Rabu (31/10), menggelar unjuk rasa di Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta. Mereka menolak ditetapkannya Upah Minimum Propinsi (UMP) 2019 sebesar Rp 1.570.922 yang dinilai masih terlalu murah.

"Bagi kami upah tersebut masih terlalu rendah kalau tidak boleh kami bilang murah," kata Koordinator Aksi, M Yusron dalam aksinya.

Puluhan pengunjuk rasa membawa bendera, spanduk dan poster yang bertuliskan keberatan dan menolak UMP Rp 1.570.922. Aksi yang mereka gelar di perempatan Kantor Pos Besar tersebut, sempat

mengundang perhatian masyarakat yang kebetulan sedang melalui jalan tersebut.

Yusron mengatakan, penetapan UMP yang rendah ini merupakan penyebab tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Berdasarkan catatan yang ada, lanjut dia, DIY masih menempati

peringkat 23 provinsi termiskin di Indonesia dan provinsi termiskin di Pulau Jawa. Angka kemiskinan per Maret 2018 adalah 12,13 persen.

Kondisi ini, menurut Yusron, adalah bukti nyata bahwa Pemda DIY gagal menyejahterakan rakyatnya. Penetapan UMP tahun depan dianggap semakin memperparah kondisi tersebut.

Karena itu, kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY bersama Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Kota Yogyakarta menolak penetapan UMP tersebut.

"Pertama kami menolak PP 78/2015 sebagai dasar penetapan UMP dan UKM DIY 2019. Kedua,

*(Bersambung hlm 18 kol 1)*

## Buruh...

(Sambungan hlm 17)

batalkan UMP DIY 2019 sebesar Rp 15 juta. Ketiga, tetapkan UMP dan UMK 2019 sesuai kebutuhan hidup layak (KHL)," katanya.

### Paling Murah

Berdasarkan kajian yang dilakukan berbagai pihak, KHL DIY untuk provinsi sebesar Rp 2.500.000. Kota Yogyakarta Rp 2.911.516, Sleman (Rp 2.859.085), Bantul (Rp 2.746.289), Kulonprogo (Rp 2.584.273), dan Gunungkidul (Rp 2.440.517).

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi membenarkan, UMP 2019 DIY memang terendah di tingkat provinsi se-Indonesia. Pada 2018, UMP tahun depan mengalami peningkatan 8,03 persen.

Rencananya seluruh provinsi akan mengumumkan besok (hari ini 1/11). Sedangkan untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 2-3 November.

Gatot mengatakan, usai rapat kordinasi pada Senin (29/10), jika nantinya UMK diumumkan maka UMP tidak akan berlaku lagi. Dalam rapat kordinasi ditetapkan UMK Kota Yogyakarta sebesar Rp1.846.400, Sleman (Rp1.701.000), Bantul (Rp1.649.800), Kulonprogo (Rp1.613.200), dan Gunungkidul (Rp1.571.000).

Sebagai catatan, khusus tahun 2020. Gubernur minta dalam penentuan KHL ditetapkan dengan tidak mengikutkan elemen nonpangan. Sebab harga pangan di Yogyakarta lebih murah dibandingkan dengan provinsi lainnya. (sgt-26)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005